

ABSTRAK

Sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini memiliki fungsi salah satunya yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa atau bisa disebut sebagai fungsi legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang kewenangan BPD di Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Khususnya tentang praktik pembentukan Peraturan Desa, terkait realisasi fungsi legislasi BPD, apakah sudah sesuai secara normatif yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan yg berlaku, dan kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa. Dengan metode yuridis empiris penelitian ini dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan ditelusuri melalui kajian kepustakaan (*library research*) serta wawancara pemangku kepentingan di Desa Sikayu. Penelitian ini menghasilkan bahwa kesesuaian peran BPD dalam realisasi fungsi legislasi tidak berjalan lurus dengan praktik pembentukan Peraturan Desa. Proses penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perwakilan dari setiap dusun menjadi penghambat paling fundamental, serta praktik pembentukan peraturan desa diperparah oleh kurangnya sosialisasi aparatur desa bersama BPD Desa Sikayu sebelum praktik pembentukan peraturan desa dilaksanakan.

Kata Kunci : Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi Legislasi

ABSTRACT

As stated in article 55 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, that the Village Consultative Body in this case has a function, one of which is to discuss and agree on the Draft Village Regulation with the Village Head or it can be called a legislative function. This study aims to determine and examine the authority of the BPD in Sikayu Village, Buayan District, Kebumen Regency. In particular regarding the practice of forming Village Regulations, related to the realization of the legislative function of the BPD, whether it is in accordance with the normative provisions of the applicable laws and regulations, and what obstacles are faced by the BPD in the formation of Village Regulations. With the empirical juridical method, this research is studied through the approach of statutory regulations (statutes approach) and traced through library research and stakeholder interviews in Sikayu Village. This research results that the suitability of the role of the BPD in the realization of the legislative function does not go hand in hand with the practice of forming Village Regulations. The research process carried out showed that the low level of education possessed by representatives from each hamlet was the most fundamental obstacle, and the practice of forming village regulations was exacerbated by the lack of socialization of village officials with the Sikayu Village BPD before the practice of forming village regulations was implemented.

Keywords: Authority, Village Consultative Body, Legislation Function